

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana pihak - pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan kearah yang lebih baik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.

Komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan data BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdapat 36 entitas. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK tahun 2012 yang sebelumnya 11 entitas memperoleh opini WTP tiap tahunnya meningkat, hingga pada tahun 2019 entitas yang memperoleh opini WTP mencapai 36 entitas. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebanyak 21 menjadi 31 entitas yang mendapatkan LKPD beropini WTP, pada tahun 2020 sebanyak 36 entitas berhasil mempertahankan peolehan opini WTP. (*Sumberjateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/*)

Pada Kota Semarang perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan sebanyak lima tahun berturut-turut yakni pada tahun 2016 yang tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berbeda dengan Kabupaten Semarang sejak tahun 2012 sampai 2020 meraih opini WTP berturut-turut. Pencapaian opini WTP tersebut tak luput dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai juga hasil kerja sama yang baik antara eksekutif

dan legislatif, opini WTP diberikan atas pertimbangan profesionalisme pemeriksaan yang dilakukan para auditor BPK RI perwakilan Jawa Tengah. sampai saat ini penyajian laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai harapan. Kenyataan ini telah ditemukan oleh BPK-RI melalui suatu sistem auditnya. Pernyataan opini tingkat kewajaran informasi LKPD berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan pada perundang - undangan yang berlaku, serta efektivitas pengendalian interen. (*Sumber jatengprov.go.id*)

Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menjadi suatu indicator keberhasilan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP berarti telah mampu secara memadai dalam mengelola keuangan yang diamanatkan walaupun masih terdapat beberapa catatan – catatan seperti pada Kabupaten Semarang terdapat catatan aset tetap yang belum bersertifikat, maupun pencatatannya yang belum tertib, sedangkan Kota Semarang Meski telah memperoleh opini WTP masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, aset, dan pembiayaan. (*Sumber jateng.antaraneews.com*)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor - faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor - faktor tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi. Dorongan utama penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya beberapa catatan - catatan pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota Semarang.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. (Mahmudi, 2007).

Menurut Halim (2020) menyatakan bahwasanya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Syafirah (2018) menyatakan bahwasanya Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas. Dengan dimilikinya Sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Untuk mencapai Kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP berbasis akrual, maka akan dapat disusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan system akuntansi.

Menurut Watidkk (2014) Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan Syafirah (2018) menyatakan bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas. Dalam SAP memangatur prinsip – prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat / daerah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (PSAP, KK; 2010).

Selain Sumber daya manusia dan Standar akuntansi pemerintah (SAP), hal yang mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penggunaan teknologi informasi ini untuk mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan multiprocesing.

Menurut Armel (2017) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Ningrum (2018) menyatakan bahwasanya Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada laporan keuangan.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahn (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten dan Kota Semarang)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang.



3. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang.
4. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang apakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan system akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai dasar atau acuan bagi pihak - pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian - penelitian selanjutnya maupun referensi lain bagi pihak yang memerlukan.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang

diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

#### BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

#### BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

#### BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.